

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MEDIA ONLINE DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI KOTA PAREPARE

Public Information Disclosure Through Online Media Transparency in Making the Procurement of Goods and Services in The City of Parepare

Sukmawati¹, Alwi²

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar (sukmakuw@yahoo.com)

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Makassar (alwiazis_63@yahoo.com)

ARTICLE INFO

Keywords:

Online Media,
Transparency, Goods /
Services

Katakunci:

Media Online,
Transparansi,
Pengadaan
Barang/Jasa

How to cite:

Sukmawati, A. (2019).
Keterbukaan Informasi
Publik Melalui Media
Online dalam
Mewujudkan
Transparansi
Pengadaan Barang
dan Jasa di Kota
Parepare. Kareba :
Jurnal Ilmu
Komunikasi, 8(1), 96-
103.

ABSTRACT

Implementation of e-procurement falls into one of the national programs to achieve good governance and free of corruption, collusion and nepotism. The aims of the study were to (1) know the quality of information in the procurement of goods and services transparency through online media in the city of Parepare, (2) Determine the transparency of procurement through online media in the city of Parepare. This research was conducted at the Office LPSE (Electronic Procurement Services) of Regional Secretariat Parepare. The method used was a qualitative approach. Data were collected with interviews, observation and documentation. Number of informants in this study were 9 persons determined with purposive sampling technique. The result of the study indicated that the quality of information through online media in the procurement of government goods/services in the city of Parepare had been accurate, timely, and relevant. Based on indicators of transparency such as ease of access, providing an opportunity to respond, update information, and the ease of the site to read and understand, the system was considered relatively transparent, although some problems were still found such as an indication of corruption practices directing the auction process packages procurement of goods and services to certain parties

Abstrak

Pelaksanaan e-procurement termasuk ke dalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui kualitas informasi dalam transparansi pengadaan barang dan jasa melalui media online di Kota Parepare, (2) Mengetahui transparansi Pengadaan Barang dan Jasa melalui media online di Kota Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Sekretariat Daerah Kota Parepare. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dengan jumlah informan sebanyak 9 (sembilan) orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi melalui media online dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kota Parepare sudah termasuk akurat, tepat waktu dan relevan. Adapun transparansi pengadaan barang/jasa melalui media online di Kota Parepare dilihat dari empat indikator, yaitu kemudahan akses, menyediakan kesempatan memberikan respon, pembaruan informasi, dan kemudahan situs untuk dibaca dan dipahami) tergolong transparan. Meskipun demikian masih terdapat masalah seperti indikasi masih adanya praktik KKN yang mengarahkan proses lelang paket pengadaan barang dan jasa kepada pihak-pihak tertentu

Copyright © 2019. KAREBA. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu melakukan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang (Cangara, 2012). Sedangkan menurut West I Turner (2008) memaparkan bahwa komunikasi adalah proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Disamping itu, pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan juga barang dan jasa, untuk itu perlu pengadaan barang dan jasa. Sistem pengadaan barang dan jasa yang baik adalah sistem pengadaan barang dan jasa yang mampu menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik, serta penataan perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Asmawi (2010) memandang bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan warga masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Sedarmayanti (2007) mengungkapkan bahwa unsur-unsur utama *governance*, yaitu : akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum ditambah dengan kompetensi manajemen dan hak-hak asasi manusia. Agus Dwiyanto (2014) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa (Rocky Marbun, 2010). Pengadaan barang dan jasa pemerintah dinilai sebagai masalah krusial, seperti ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Segala bentuk kolusi atau persekongkolan masih sering terjadi. Contoh persekongkolan yang banyak terjadi adalah adanya perencanaan pengadaan barang dan jasa secara eksklusif oleh pelaku usaha tertentu sehingga kualifikasi barang dan jasa mengarah kepada merek tertentu; panitia tender mengarahkan pemenang tender kepada kolega atau perusahaan yang punya hubungan kerjasama dengannya; dan terjadi diantara peserta tender sehingga pemenang tender diatur tanpa menghiraukan persyaratan objektif, terjadi kecenderungan "tender arisan" sehingga proses tender bersifat semu dan hanya untuk memenuhi prosedur.

Dalam era reformasi dewasa ini, pemerintah tengah berusaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan demokratis. Salah satunya dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan layanan publik terhadap masyarakat melalui kebijakan/peraturan yang efektif, efisien dan mencerminkan keterbukaan/transparansi mengingat masyarakat berhak untuk memperoleh jaminan terhadap akses informasi publik/kebebasan terhadap informasi, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana salah satu tujuan dari keterbukaan informasi publik adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Saat ini telah diterapkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik disebut dengan *E-Procurement* yang merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik (berbasis web/internet). Seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pada *e-procurement* dilakukan melalui media online, yaitu melalui website (www.inaproc.go.id). Tujuan dari *e-procurement* ini diantaranya adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah; meningkatkan persaingan yang sehat dalam rangka penyediaan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pelaksanaan *e-procurement* termasuk ke dalam salah satu program nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana nantinya melalui program tersebut seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah harus menerapkan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa. *E-procurement* menawarkan kesempatan seluas-luasnya untuk perbaikan dalam biaya dan produktivitas. Oleh karenanya *e-procurement* merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyempurnakan manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pencarian sumber pembelian. Sehingga *e-procurement* akan meningkatkan kunci keberhasilan dalam peningkatan daya saing di masa datang.

Hal tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Badzlina Daroyani Novitaningrum (2014), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengadaan barang/jasa pemerintah kota Surabaya melalui *e-procurement* telah berhasil diwujudkan, dengan menerapkan sistem *eprocurement* Pemerintah Kota Surabaya mampu mewujudkan suatu sistem yang akuntabel dan mampu dipertanggungjawabkan di setiap tahapan pengadaan barang/jasa. Penelitian lain dilakukan oleh Arindra Rossita Arum Nurchana & Bambang Santoso (2012) yang menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* di Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan kurang efektif. Hal ini karena terdapat satu tujuan yang belum tercapai secara maksimal, yaitu peningkatan persaingan usaha yang tidak sehat karena ditemukan adanya indikasi peluang “kecurangan”.

Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang menggunakan *e-procurement*. Layanan ini dapat diakses melalui situs www.lpseparepare.com. Akan tetapi, dalam teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) di Kota Parepare ternyata masih terdapat beberapa permasalahan. Misalnya: adanya isu-isu yang merebak di kalangan penyedia, seperti indikasi masih adanya praktik KKN yang mengarahkan proses lelang paket pengadaan barang dan jasa kepada pihak-pihak tertentu, seperti yang dikatakan oleh beberapa rekanan melalui hasil wawancara bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa persyaratan yang dikeluarkan oleh panitia kadang tidak berhubungan dengan kegiatan/pekerjaan tersebut. Sehingga ada indikasi bahwa proses lelang tersebut sudah diarahkan kepada pihak-pihak tertentu. Selain itu kendala teknis seperti sistem yang sering terputus dengan jaringan menyebabkan terhambatnya proses lelang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui transparansi pengadaan barang/jasa melalui media online di Pemerintah Kota Parepare.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Lokasi dan Jenis Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) yang merupakan unit layanan yang melekat di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Parepare.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (1993) mengatakan bahwa penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2.2. Informan

Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari Kepala ULP Kota Parepare, Sekretaris LPSE, Panitia Pengadaan/Pokja ULP, dan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Kota Parepare.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi.

2.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini didahului dengan upaya mengungkap kebenaran dari subjek penelitian dengan menguji jawaban-jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka (Kriyantono, 2012). Selanjutnya peneliti melakukan analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek penelitian dengan meneliti autentitasnya berdasarkan data empiris yang ada. Tahapan berikutnya semua pandangan, pendapat ataupun data dari suatu subjek penelitian dianalogkan dengan pendapat, pandangan, ataupun data dari subjek lainnya.

3. HASIL PENELITIAN

3.1. Kualitas Informasi Pengadaan Brang/Jasa Melalui Media Online di Kota Parepare

Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa peranan informasi pengadaan barang/jasa memegang peranan penting. Karena apabila pelaku pengadaan barang/jasa tidak memiliki informasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan/atau memperoleh atau memiliki informasi pengadaan barang/jasa yang salah, tidak relevan dan sudah tidak *up to date*, akan menyulitkan baginya menyelesaikan proses pengadaan barang/jasa tersebut dengan baik dan sempurna. Bahkan dapat menyebabkan kerugian keuangan negara/daerah. Informasi harus dimiliki dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Keberhasilan suatu produk kebijakan dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran yang akan dicapai. Data yang berkualitas sangat diperlukan dalam memberikan informasi. Dengan adanya data yang berkualitas maka informasi yang dihasilkan akan lebih berkualitas juga. Informasi yang dihasilkan dikatakan berkualitas, apabila informasi yang didapatkan akurat, tepat waktu, dan relevan. Informasi merupakan kunci keberhasilan dalam

melaksanakan suatu kegiatan untuk pengambilan keputusan, karena informasi merupakan faktor penting dalam melakukan kegiatan.

Keakuratan Informasi. Dalam tender melalui LPSE, dokumen hampir baku atau sudah standar dimana hasilnya bisa diketahui lebih cepat dibanding pengadaan yang dilakukan secara elektronik. Melalui LPSE nilai penawaran akan muncul sehingga dapat diketahui oleh penyedia lain, selain itu di dalam dokumen akan muncul RAB, persyaratan tenaga teknis, peralatan serta gambarnya, serta spesifikasi dari jenis barang yang dibutuhkan.

Ketepatan Waktu. Dalam penyajian informasi harus disajikan secara tepat waktu karena jika tidak ada ketepatan waktu maka pihak penyedia akan dirugikan karena tidak bisa mempersiapkan diri untuk melakukan pelelangan. Melalui LPSE penyampaian pengumuman lelang disampaikan sesuai jadwal. Setiap tahapan dalam proses pengadaan melalui media online ini memiliki batas waktu, misalnya untuk memasukkan dokumen penawaran, apabila rekanan terlambat mengetahui informasi tersebut maka harus menunggu sampai ada pengadaan selanjutnya atau apabila terjadi pengunduran jadwal lelang dilakukan sehingga penyedia harus selalu membuka situs tersebut.

Informasi Relevan. Dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia tentunya membutuhkan informasi pada setiap tahap pekerjaan atau selama proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa berlangsung. Melalui layanan LPSE mereka dapat melihat langsung informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor, cukup membuka layanan LPSE Parepare informasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mulai dari perencanaan pengadaan, penawaran, pengumuman pemenang sampai selesainya proses pengadaan akan dimuat pada situs tersebut. Terlepas dari hal tersebut, dalam proses pengadaan barang/jasa karena belum adanya aturan yang dikeluarkan tentang panduan sertifikat tenaga ahli sehingga terkadang panitia pengadaan meminta persyaratan SKT yang berlebihan dan tidak sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilelang.

3.2. Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Online di Kota Parepare

Transparansi menunjukkan suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna atau *stakeholders* yang membutuhkan. Jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses dan mudah dipahami oleh publik, maka praktik penyelenggaraan pelayanan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi. Informasi yang disampaikan dalam SIRUP tersebut harus tersedia yakni setiap informasi yang disampaikan memang sudah disusun dan diinput sesuai dengan pelaksanaan pengadaan. Segala informasi yang disediakan dalam *website* LPSE Parepare ini sudah siap untuk disajikan untuk para pengguna layanan serta untuk diketahui tanpa harus ada terjadi kecurigaan.

Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui media online dapat dilihat dari ketersediaan atas informasi proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, dimana informasi itu harus mudah diakses dan memperoleh informasi, terdapat pembaruan informasi, menyediakan kesempatan bagi pengguna untuk memberikan respon, dan terdapat kemudahan dalam memahami informasi yang ditampilkan. (a) Kemudahan Akses dan Memperoleh Informasi. Informasi terbuka bebas untuk siapa saja, masyarakat luas dapat melihat melalui *website* LPSE Kota Parepare, hanya mengklik SIRUP maka seluruh paket pekerjaan dalam system tersebut akan muncul, serta mengenai berapa anggaran yang digunakan untuk pengadaan semua akan terlihat jelas melalui aplikasi tersebut. (b) Menyediakan Kesempatan Bagi Pengguna Memberikan Respon. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa elektronik terdapat tahap penjelasan yang disebut *aanwijzing*. Pada tahap ini penjelasan, pertanyaan dan jawaban dilakukan secara *online*. Panitia dan seluruh pendaftar pada lelang tersebut bisa saling bertukar penjelasan, pertanyaan dan jawaban. Tanya jawab dilakukan sampai batas waktu

aanwijzing selesai. (c) Pembaruan Informasi. Pemberian informasi dilakukan secara berkelanjutan supaya rekanan dapat mengetahui perkembangan tentang pelelangan barang dan jasa. Setiap tahapan selalu diinformasikan melalui LPSE agar penyedia diharapkan tidak ada keterlambatan dalam mengikuti setiap tahap kegiatan proses pengadaan (d) Kemudahan Informasi Untuk Dibaca dan Dipahami. Pada tampilan awal dapat dilihat, penataan sub menu seperti *e-procurement*, pengumuman, berita dan lain lain sangat teratur dan berada diatas sehingga web dapat dan mudah dibaca. Menu *search* bisa dijumpai ketika kita membuka sub menu misalnya “pemenang lelang”. Ketika kita mengarahkan kursor pada menu maupun *link* tertentu maka hurufnya akan berubah warna atau kursornya akan berganti. Hal tersebut agar *users* dapat mengetahui bahwa link tersebut jika diklik akan menyajikan informasi secara lebih lengkap. Secara keseluruhan situs *lpse.parepare.com* sudah baik dan informatif. Hanya saja masih terdapat beberapa kekurangan misalnya minimnya animasi yang dapat menarik minat pengguna untuk membaca. Dalam Mengakses situs ini *users* tidak akan kebingungan karena *layout* maupun desain tata letaknya cukup efektif.

4. PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas informasi pengadaan barang/jasa melalui media online di Pemerintah Kota Pare dapat dikatakan akurat, tepat waktu dan relevan, dan tingkat transparansi pengadaan barang/jasa melalui media online di Pemerintah Kota Parepare tergolong cukup tinggi dilihat dari beberapa indikator.

Internet merupakan suatu teknologi yang menggambarkan secara jelas properti-properti seperti *convergen, digital networking, global reach, convergent, interaktivitas, dan many-to-many communication*, serta suatu bentuk media yang mengizinkan penggunaannya menjadi pencipta maupun pengguna isi atau pesan (Flew, 2014). *New Media* atau media online merupakan perangkat teknologi komunikasi yang berbagi ciri yang sama yang mana selain baru dimungkinkan dengan digitalisasi dan ketersediaannya yang luas untuk penggunaan pribadi sebagai alat komunikasi (Denis McQuail, 2011). Media online adalah sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia dengan memiliki informasi yang bersifat update (terbaru), aktual dan menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet, dan dapat digunakan sebagai sarana produksi dan penyebaran informasi. Ada beberapa karakteristik umum yang dimiliki media online, yaitu : Kecepatan Informasi; Pembaruan (*Updating*); Interaktivitas; Personalisasi; Kapasitas muatan dapat diperbesar; Terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*).

Kecepatan Informasi. Melalui pengadaan secara elektronik (*e-procurement*) seluruh proses pengadaan pun mulai dari rencana pengadaan sampai pada tahap selesainya pekerjaan/kegiatan pengadaan barang/jasa akan lebih cepat dilakukan. Karena *e-procurement* sebagai perangkat teknologi, prosedur dan langkah-langkah organisasi yang memungkinkan pembelian barang/jasa secara online sehingga seluruh tahap pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, tak perlu menunggu lama, dalam hitungan jam bahkan menit informasi bisa langsung didapatkan. Dengan demikian mempercepat distribusi informasi ke pasar (pengakses).

Pembaruan Informasi. Informasi yang diberikan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Kota Parepare sudah termasuk *update*, karena setiap perubahan informasi pihak LPSE Parepare segera melakukan pembaruan berita. Informasi yang diberikan terus menerus karena dalam pengadaan melalui media online ini terdapat kegiatan yang memiliki batas waktu, sehingga apabila informasi ini terlambat dimuat maka dapat menghambat proses pekerjaan lainnya misalnya terjadinya pengunduran jadwal lelang. Begitupun sebaliknya, pihak penyedia (rekanan) harus selalu memantau pembaruan informasi. Misalnya, untuk memasukkan dokumen penawaran, apabila pihak rekanan terlambat

mengetahui informasi tersebut maka harus menunggu sampai ada pengadaan selanjutnya atau apabila terjadi pengunduran jadwal lelang dilakukan.

Interaktivitas. Dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa elektronik, terdapat tahap penjelasan yang biasa disebut dengan *aanwijzing*. Pada tahapan ini tidak dilakukan tatap muka, masing-masing pihak cukup berada di depan komputer mereka. Penjelasan, pertanyaan dan jawaban dilakukan secara *online*. Panitia dan seluruh pendaftar pada lelang tersebut bisa saling bertukar penjelasan, pertanyaan, dan jawaban. Dengan cara seperti ini, tidak ada kontak fisik yang terjadi. Tanya jawab dilakukan sampai batas waktu *aanwijzing* selesai.

Personalisasi. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi kebutuhan informasi. Dalam hal pengadaan barang jasa artinya dilakukan identifikasi kebutuhan informasi pada perencanaan, pelaksanaan pengadaan baik pelaksanaan lelang/seleksi dan pelaksanaan kontrak, serta pada tahapan pengawasan pengadaan barang jasa baik internal dan eksternal. Identifikasi kebutuhan informasi ini adalah hal apa saja yang dibutuhkan pada setiap kegiatan langkah pengadaan barang jasa. Melalui layanan LPSE Kota Parepare para penyedia bisa melihat atau mengetahui informasi yang mereka butuhkan pada setiap tahapan kegiatan dan untuk mendapatkan informasi itu mereka hanya membuka layanan LPSE Kota Parepare karena semua informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi secara elektronik.

Kapasitas Muatan Dapat Disimpan dan Diperbesar. Hasil dokumentasi informasi pengadaan barang jasa ini harus disimpan dan diorganisasi secara teratur, lengkap, cermat, aman dan mudah dilacak atau diambil kembali ketika informasi pengadaan barang jasa tersebut diperlukan. Tujuan tahapan ini adalah untuk menata informasi yang telah dikumpulkan, diolah, dianalisis sebelumnya. Selanjutnya juga dapat menghindari adanya duplikasi atau redundansi pekerjaan, dan tentunya tahap ini berguna agar informasi tersebut dikatakan mampu telusur ketika dibutuhkan di masa mendatang. Bagi pihak penyedia, untuk memasukkan penawaran akan lebih efektif, dimana ketersediaan file akan tersimpan karena ketika mereka pernah ikut lelang maka data-data penyedia tetap tersimpan pada sistem.

Terhubung dengan Sumber Lain. Pada sistem *e-procurement* seluruh proses lelang mulai dari pengumuman, mengajukan penawaran, seleksi, sampai pengumuman pemenang akan dilakukan secara online melalui situs internet. Setiap informasi yang disajikan mengenai pengadaan barang/jasa dapat dihubungkan dengan sumber lain yang juga berkaitan dengan informasi tersebut. Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan akan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi pengadaan barang/jasa melalui media online di Kota Parepare dapat dikatakan akurat, tepat waktu dan relevan. Terlepas dari hal tersebut, masih terdapat persoalan di antara penyedia seperti indikasi bahwa masih adanya praktik KKN yang mengarahkan proses lelang paket pengadaan barang dan jasa kepada pihak-pihak tertentu, seperti persyaratan yang dikeluarkan oleh panitia kadang tidak berhubungan dengan kegiatan/pekerjaan tersebut. Transparansi Pengadaan Barang/Jasa melalui media online di Kota Parepare dilihat dari indikator: kemudahan mengakses dan memperoleh informasi, menyediakan kesempatan bagi pengguna memberikan respon, pembaruan informasi, dan kemudahan informasi untuk dibaca/dipahami dapat dikatakan memiliki tingkat transparansi yang tinggi. Hanya saja dari pihak SKPD kadang terlambat memasukkan rencana kegiatan, namun hal ini tidak menghambat

proses pengadaan barang/jasa elektronik di Pemerintah Kota Parepare. Oleh karena itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) membuat aturan tentang Pendekatan Kebutuhan Tenaga Ahli (SKA/SKT) agar pekerjaan yang dihasilkan memiliki kualitas dan mutu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna barang/jasa. Selain itu pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) atau panitia pengadaan barang/jasa agar meningkatkan pemberian motivasi kepada pihak SKPD untuk memasukkan rencana kegiatan tepat waktu agar tidak menghambat proses pekerjaan lain.

REFERENSI

- Arindra Rossita Arum Nurchana & Bambang Santoso. (2012). *Efektivitas E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Terhadap Penerapan E-Procurement Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bojonegoro)*. Diakses tanggal 27 April 2016. Available from: <http://studentjournal.ub.ac.id>
- Badzlina Daroyani Novitaningrum. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Electronic Procurement (Best Practice di Pemerintah Kota Surabaya)*. Diakses tanggal 27 April 2016. Available from: <http://journal.unair.ac.id>
- Cangara, Hafied. (2012). *Pengantar Ilmu komunikasi*. Raja GrafindoPersada : Jakarta.
- Dennis, McQuail. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Salemba Humanika : Jakarta
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Flew, Terry. (20014). *New Media : An Introduction*. Oxford University : Australia.
- Kriyantono, Rachmat. 2012. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana Perdana Media Group : Jakarta.
- Marbun, Rocky. 2010. *Tanyaa Jawab Seputar Tata Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Transmedia Pustaka : Jakarta
- Moleong, Lexy J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda : Bandung.
- Rewansyah, Asmawi. (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. CV. Yusaintanas Prima : Jakarta
- Richard West, Linn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi (Analisis dan Aplikasi)*. Salemba Humanika : Jakarta.
- Sedarmayanti. (2007). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung